

Pungli dan Krisis Akhlak

Rabu, 19-10-2016

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Baru-baru ini terungkap kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum birokrasi pemerintahan. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menasehatkan, akibat dari adanya pungli tersebut akan membuat masyarakat semakin berkurang kepercayaannya terhadap pemerintah.

“Amanah masyarakat yang dititipkan ke pemerintah pun dicerai oleh oknum nakal pemerintahan,” tegas Busyro, Senin (17/10), ketika dihubungi redaksi website Muhammadiyah.or.id.

Busyro juga mengatakan, Pemerintah saat ini belum 100% serius menanggapi masalah pungli yang terjadi di beberapa birokrasi pemerintahan.

Selain itu, Busyro juga menjelaskan bahwa, pungli sudah banyak terjadi dari masa orde baru. Hal ini sebenarnya banyak ditutupi oleh oknum-oknum yang saling bekerja sama di birokrasi pemerintahan.

“KPK telah melakukan banyak hal, dari mulai mencari hilir dan hulu,” ujar Mantan Ketua KPK tersebut.

Busyro menegaskan, banyak terjadinya pungli ini salah satunya akibat terjadinya krisis akhlak sejak masa orde baru. “Budaya juga menjadi salah satu hal penyebab terjadinya pungli. Budaya yang mencerminkan sifat-sifat instan, seperti keinginan menghasilkan sesuatu yang besar tanpa kerja keras, kerja profesional, dan akuntabel,” tegasnya.

Busyro berharap kedepannya pemerintahan dapat memisahkan urusan politik dengan birokrasi pemerintahan agar nantinya urusan pungli dapat diatasi.

Selain itu Busyro menambahkan Pemerintah harus menata ulang sistem rekrutment yang ada di pemerintahan. “Jangan sampai ada urusan kepentingan-kepentingan tertentu, semacam nepotisme dan kepentingan politik,” tutup Busyro. (adam)

Reporter : Syifa Rosyiana Dewi